

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUPANG

Tiffany N. P. Gah^{1*}, Ferdyan Tallo Manafe²

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

*E-mail: tiffanygah@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the Financial Performance of the Regional Financial and Asset Management Agency of Kupang Regency. In this study, the method used is descriptive quantitative, where the data source consists of secondary data obtained from data collection through observation, interviews and document or library studies. This study uses financial statement analysis in assessing financial performance

The technical analysis of the data used is descriptive quantitative with the formula: Fiscal Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Harmony Ratio and Growth Ratio. The results of the analysis show that the Regional Financial Performance of Kupang Regency is seen from (1) the Ratio of the Degree of Fiscal Decentralization is still very low because the average ratio is 6.79%, (2) the Regional Financial Independence Ratio is still very low and belongs to the instructive pattern because the average the average is only 7.92%, (3) the PAD Effectiveness Ratio can be categorized as less effective because the average ratio is 81.4%, (4) the Regional Financial Efficiency Ratio is categorized as efficient because the average ratio is 96.40%, (5) The Harmony Ratio can be said that the Kupang Regency Government allocates most of its budget for regional operating expenditures, which is 74.80% compared to capital expenditures of 13.84% and (6) Growth Ratio of PAD, Revenue, Operational Expenditures and Capital Expenditures has decreased from year to year.

Keywords: *Regional Financial Performance, Regional Financial Report.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dapat melaksanakan segala tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah adalah menyampaikan laporan keuangan secara berkala atau dalam masa periode pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah harus berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan harus dinilai apakah pemerintah berhasil dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah.

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan, karena dengan menganalisis laporan keuangan dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, mengatakan bahwa Laporan keuangan memberikan informasi yang relevan tentang posisi

keuangan dan juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan harus dianalisis agar dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan.

Pemerintah Kabupaten kupang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang wajib membuat dan meaporkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas sumber daya keuangan yang telah digunakan untuk melakukan program kerja pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kupang adalah: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercemin dalam besarnya bantuan pemerintah.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah di atas dengan cara analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten kupang. Hal ini penting untuk dilakukan untuk melihat seberapa baik kinerja keuangan pemerintah

kabupaten kupang. Hasil dari laporan keuangan dan analisis kinerja keuangan dapat membantu pemerintah untuk pengambilan keputusan yang baik bagi pelaksanaan program kerja pemerintah, guna meningkatkan kinerja pemerintah.

Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang. Analisis rasio yang digunakan adalah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Analisis rasio keuangan dipilih karena analisis rasio keuangan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam perkembangan suatu daerah. Melalui analisis rasio keuangan pemerintah daerah kabupaten kupang dapat mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

Analisis terhadap Laporan Keuangan dalam menilai Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik atau tidak, serta memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat.

Data perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2018-2020 tersaji pada tabel 1.

Berdasarkan data APBD diatas dapat dilihat bahwa Anggaran PAD dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dan penurunan. pada tahun 2018 anggaran PAD sebesar Rp. 85.244.781.020,12 mengalami peningkatan sebesar Rp. 87.416.745.768,32 pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 61.488.200.000,00. untuk anggaran Pendapatan Daerahnya tahun 2018-2020 Pendapatan daerah mengalami peningkatan dan penurunan. Dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.283.332.114.446,26 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.296.926.426.852,06 pada tahun 2019 dan

tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 876.132.767.836,00. Sedangkan untuk Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.221.688.581.122,00, pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.211.863.528.921,00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 792.819.508.940,00. Jadi dapat dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan Daerah cenderung meningkat dan Realisasi Belanja Daerah cenderung menurun. perbedaannya terjadi pada tahun 2020 dimana pada masa pandemi Covid Anggaran Pendapatan Daerah mengalami penurunan yang disebabkan karena terjadinya pengurangan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan yang disebabkan karena terjadinya pengurangan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Perubahan yang terjadi ini disebabkan oleh dampak negatif dari pandemic Covid-19.

Permasalahan yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yaitu terjadi pada tahun 2020 dimana sektor Pemerintahan mengalami penurunan Pendapatan yang terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara terjadi peningkatan Belanja pemerintah, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial. pengelolaan belanja yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 menimbulkan permasalahan baru. Misalnya dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran Belanja untuk Covid-19 yang jumlahnya cukup besar menimbulkan ketidakjelasan, terutama pada penggunaan Belanja tidak terduga.

Masalah pada Pemerintahan Kabupaten Kupang adalah kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu pemerintah yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keuangan pemerintah daerah kabupaten kupang yang mencerminkan prestasi kerja selama tiga tahun terakhir.

Penelitian ini menguji kembali dengan yang penelitian sebelumnya (Farida dan Nugraha (2019): Sartika (2019): Fatha (2017): Nurdiwaty dan Zaman (2016): Pramono (2014) Andhiantoko (2013)). Maka dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2020".
Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran dan Realisasi	PAD	Anggaran dan Realisasi	
		Total Pendapatan	Total Belanja
2018	85.244.781.020,12	1.283.332.114.446,26	1.221.688.581.122,00
2019	87.416.745.768,32	1.296.926.426.852,06	1.211.863.528.921,00
2020	61.488.200.000,00	876.132.767.836,00	792.819.508.940,00

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang Jl. Naibonat, Kupang Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Subjek dalam penelitian ini ialah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang dan obyek yang diteliti yaitu Laporan Keuangan.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah : Data Sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, Misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono 2016). Data sekunder yang didapat berupa data dokumentasi yaitu laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten kupang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menjabar kondisi subjek dan obyek penelitian pada periode penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya.

Penulis menggunakan rumus : Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan dan Rasio Pertumbuhan.

Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan tingkat kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. Suatu daerah dikatakan layak menjadi daerah otonom bila salah satu syaratnya memiliki kemampuan pembiayaan yang berasal dari potensi yang dimilikinya sendiri. Rasio ini Menunjukkan Derajat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Rasio dirumuskan dengan membagi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rumus menggunakan sumber dari Mahmudi (2010).

$$DDF = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Rumus menggunakan sumber dari Halim (2007).

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan/penerimaan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rumus menggunakan sumber dari Mahmudi (2010).

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus menggunakan sumber dari Mahmudi (2010).

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi

masyarakat cenderung semakin kecil. Menurut Mahmudi (2010) rasio keserasian dapat diukur sebagai berikut: Rasio Belanja Operasi.

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan Pemerintah Daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Modal}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode berikutnya. Rumus menggunakan sumber dari Mahmudi (2010).

$$r = \frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan dibidang politik maupun administrasi tanpa diberangi dengan desentralisasi fiskal merupakan yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang didalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal maka tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberikan keleluasan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka

keseimbangan fiskal. Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah alam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan.

Tabel 2 Hasil Perhitungan Rasio DDF BPKAD Kabupaten Kupang TA 2018-2020

TA	PAD (RP)	TPD (RP)	DDF (%)	Ket
2018	85.244.781.020,12	1.283.332.114.446,26	6,64%	Sangat Kurang
2019	87.416.745.768,32	1.296.926.426.852,06	6,74%	Sangat Kurang
2020	61.488.200.000	876.132.767.836	7,01%	Sangat Kurang
Rata-Rata			6,79%	Sangat Kurang

Hasil analisis sebagaimana dalam tabel 2 perhitungan diatas menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal kabupaten kupang dapat dikategorikan sangat kurang. pada tahun 2018 rasio BPKAD Kabupaten Kupang sebesar 6,64%, naik menjadi 6,74% pada tahun 2019 dan naik lagi menjadi 7,01% di tahun 2020. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2018-2020 namun dapat dikatakan kemampuan keuangan Kabupaten Kupang masih Sangat Kurang, karena rata-rata rasionya masih berada dalam skala 00,00-10,00%. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Kupang belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan dan penyelenggaraan desentralisasi dari aspek pendapatan asli daerah masih sangat kurang.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2018-2020

TA	PAD (RP)	Pendapatan Transfer (RP)	RKKD (%)	Ket
2018	85.244.781.020,12	1.147.745.333.426,14	7,42	Instruktif
2019	87.416.745.768,32	993.006.192.083,74	8,80	Instruktif
2020	61.488.200.000	812.491.767.	7,56	Instruktif

000	836
	Rata-rata
	7,92 Instruktif

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan daerah BPKAD Kabupaten Kupang tergolong masih Sangat Rendah dan Pola Hubungannya termasuk Pola Hubungan Instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada Pemerintah Daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), Karena Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama Tiga Tahun masih tergolong dalam interval 0-25%.

Nilai terendah terjadi pada tahun 2018 dimana nilainya sebesar 7,42% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,80%. Sedangkan tahun 2020 sebesar 7,56%. Hal ini disebabkan karena kemampuan Keuangan Kabupaten Kupang masih sangat rendah sekali atau masih berpola instruktif yang artinya peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dibandingkan Kemandirian Pemerintah Daerah atau dengan kata lain masih Bergantung dengan pihak eksternal.

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah

Tabel 4 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD BPKAD Kab Kupang TA 2018-2020

TA	Realisasi PAD (RP)	Anggaran PAD (RP)	Rasio (%)	Ket
2018	66.182.995.394,25	85.244.781.020,12	77,63	Tidak Efektif
2019	62.040.535.548,64	87.416.745.768,32	70,97	Tidak Efektif
2020	58.785.478.560,59	61.488.200.000	95,60	Tidak Efektif
		Rata-Rata	81,4	Tidak Efektif

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 diatas dapat dikatakan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah BPKAD Kabupaten Kupang pada tahun 2018- 2020 berada dalam kategori Tidak Efektif, karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100% yaitu 77,63% pada tahun 2018, 70,97% pada tahun 2019 dan 95,60% pada tahun 2020. tetapi, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan dari segi Rasio

Efektivitas PAD yang paling baik adalah pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan dari yang sudah dianggarkan sebelumnya.

Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Tabel 5 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKAD Kab Kupang TA 2018-2020

TA	Belanja Daerah (RP)	Pendapatan Daerah (RP)	Rasio (%)	Ket
2018	1.221.688.581.122	1.236.846.999.491,25	98,77	Efisien
2019	1.211.863.528.921	1.266.901.145.258,64	95,65	Efisien
2020	792.819.508.940	836.362.953.414,59	94,79	Efisien
		Rata-Rata	96,40	Efisien

Hasil perhitungan pada tabel 5 diatas Efisiensi Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Kupang pada Tahun 2018 sebesar 98,77%, sedangkan tahun 2019 sebesar 95,65% dan tahun 2020 sebesar 94,79% tergolong Efisien karena interval efisiensinya dibawah 100%. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang sudah dapat menekan atau menggefisiensikan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya.

Analisis Rasio Kerasian

Rasio Kerasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Tabel 6 Perhitungan Rasio Kerasian Belanja Operasi BPKAD Kab Kupang TA 2018-2020

TA	Belanja Operasi (RP)	Belanja Daerah (RP)	Rasio (%)
2018	1.003.029.064.991	1.306.708.246.379,60	76,75
2019	1.049.185.008.815	1.335.121.760.746,65	78,58
2020	663.610.687.906	960.455.369.721	69,09
		Rata-Rata	96,40

Berdasarkan hasil perhitungan pada

tabel 6 dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja operasi BPKAD Kabupaten Kupang yaitu sebesar 74,80%. dimana pada tahun 2018 belanja operasi sebesar 76,75%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 78,58% dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 69,09%. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang masih memprioritaskan belanja operasinya terutama untuk belanja gaji pegawai PNS.

Tabel 7 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal BPKAD Kab Kupang TA 2018-2020

TA	Belanja Modal (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio (%)
2018	218.108.209.235	1.306.708.246.379,60	16,69
2019	160.217.090.741	1.335.121.760.746,65	12,00
2020	123.375.912.034	960.455.369.721	12,84
		Rata-Rata	13,84

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa Rasio Keserasian Belanja Modal keuangan Daerah Kabupaten Kupang pada Tahun 2018 sebesar 16,69%, tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 12,00% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 12,84%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil.

Analisis Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai selama beberapa periode.

Tabel 8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD BPKAD Kab Kupang TA 2018-2020

TA	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio (%)	Ket
2018	66.182.995.394,25	-	
2019	62.047.535.548,64	-6,24	Sangat Rendah
2020	58.785.478.560,59	-5,25	Sangat Rendah
	Rata-Rata	-5,74	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat diketahui bahwa tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah mengalami Penurunan yakni sebesar -6,24% pada tahun 2019 dan -5,25% pada

tahun 2020. penurunan Pertumbuhan PAD BPKAD Kabupaten Kupang yang terjadi pada tahun 2018-2020 ini masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam hal mempertahankan dan meningkatkan PAD dari tahun 2018-2020 masih sangat rendah.

Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan

Tabel 9 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan BPKAD Kab Kupang TA 2018-2020

TA	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Ket
2018	1.236.846.999.491,25		
2019	1.266.901.145.258,64	2,42	Sangat Rendah
2020	836.362.953.414,59	-33,98	Sangat Rendah
	Rata-Rata	-15,78	Sangat Rendah

Hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel 9 diatas menunjukkan bahwa tahun 2019 Rasio Pertumbuhan Pendapatan sebesar 2,42%. dapat dikatakan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan pendapatan dari tahun 2018-2019 sebesar 2,42% berada dalam kategori sangat rendah. Tahun 2020 Realisasi Pendapatan Mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga memperoleh Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan yang negatif yaitu sebesar -33,98%. Hal ini berarti bahwa Kemampuan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pada tahun 2020 sangat rendah.

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

Tabel 10 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi BPKAD Kab Kupang TA 2018-2020

TA	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio (%)	Ket
2018	1.003.029.064.991		
2019	1.049.185.008.815	4,60	Sangat Rendah
2020	663.610.687.906	-36,74	Sangat Rendah
	Rata-Rata	-16,07	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa tahun 2019 Realisasi Belanja Operasi sebesar 4,60%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mempertahankan dan meningkatkan Realisasi Belanja Operasi dari tahun 2018-2019 sebesar 4,60% dan masuk dalam kategori sangat rendah. Pada tahun 2020 Realisasi

Belanja Operasi mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi yang diperoleh bernilai negatif yaitu sebesar -36,74%. Ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam mempertahankan dan meningkatkan Belanja Operasi masih termasuk dalam kategori sangat rendah.

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Tabel 11 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal BPKAD Kab Kupang TA 2018-2020

TA	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Rasio (%)	Ket
2018	218.108.209.235		
2019	160.217.090.741	-26,54	Sangat Rendah
2020	123.375.912.034	-22,99	Sangat Rendah
	Rata-Rata	-24.76	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 11 perhitungan diatas dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Belanja Modal pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan yakni tahun 2019 sebesar -26,54% dan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar -22,99%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan Realisasi Belanja Modal dari tahun 2018-2019 dan 2019-2020 masih sangat rendah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan pertumbuhan belanja modal disebabkan karena banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Derajat desentralisasi fiskal kabupaten kupang rata-rata berada pada kisaran skala 0,00-10,00%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam upaya menerima Pendapatan Asli Daerah masuk dalam kategori sangat kurang.
2. Kinerja keuangan BPKAD kabupaten kupang jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2018-2019 rasionya masing-masing sebesar 7,42%, 8,80% dan 7,56%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pihak eksternal masih sangat tinggi.
3. Kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Kupang jika dilihat dari rasio efektivitas PAD

pada tahun 2018-2020 berjalan tidak efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% yaitu pada tahun 2018 sebesar 77,63%, pada tahun 2019 sebesar 70,97% dan tahun 2020 sebesar 95,60%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan.

4. Capaian efisiensi untuk tahun 2018-2020 berada pada skala dibawah 100% dimana pada tahun 2018 sebesar 98,77%, tahun 2019 sebesar 96,65%, tahun 2020 sebesar 94,79%, artinya masuk dalam kategori efisien. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menggunakan dananya belum berimbang, karena sebagian besar APBD digunakan untuk belanja Operasional sedangkan rasio belanja modal terhadap APBD masih rendah.
6. Pemerintah Kabupaten Kupang memiliki kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan Realisasi PAD, Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja Operasi dan Realisasi Belanja Modal dari tahun ke tahun masih tergolong sangat rendah karena tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun rata-ratanya berada pada skala 0-10%.

Disarankan untuk Pemerintah Kabupaten Kupang harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal Pemungutan Pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dalam hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber- sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pemerintah Kabupaten Kupang sebaiknya lebih mengurangi proposional dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

Perhitungan rasio pertumbuhan yang masih kurang baik diharapkan Pemerintah Kabupaten Kupang lebih memperhatikan setiap aspeknya, terutama pada aspek pertumbuhan PAD, Pendapatan, Belanja Operasi dan Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhiantoko, H, (2013), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blora), *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107-124. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Ilmiah Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Halim, Abdul. (2007), Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurdiwaty, D., & Zaman, B. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Kediri). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(1), 31-40. <https://doi.org/10.22219/jibe.v7i1.3382>
- Peraturan Pemerintah, (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147-153. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.